

**PEMILU PRESIDEN DAN INTERVENSI ASING:
MENYINGKAP TUDINGAN INTERVENSI RUSIA DALAM PILPRES
DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA**

***ELECTIONS AND FOREIGN INTERVENTIONS:
DISLOSING THE ALLEGED RUSSIA'S INTERVENTIONS IN
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE UNITED STATES AND INDONESIA***

Poltak Partogi Nainggolan

(Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD
Jalan Gatot Subroto, Ged. Nusantara I, lantai 2, Setjen DPR RI,
e-mail: pptogin@yahoo.com)

Naskah Diterima: 16 Mei 2019, direvisi: 30 Agustus 2019,
disetujui: 30 September 2018

Abstract

Foreign interventions and the involvement of non-state actors in elections, since their preparations and campaign period is a crucial issue, including in Indonesia, which has simultaneously held legislative and presidential elections on April 17, 2019. Investigations in US court regarding this case have further revealed the alleged Russian interventions through the use of propaganda method of firehose of falsehood with a successful implementation of a covert intelligence operation. The practice that brought about Trump's victory has alarmed Indonesian people on the possible similar practice in the country. This essay discussed the alleged Russia's interventions probably occurred in presidential elections in the United States and Indonesia. Applying a qualitative method, its data collecting was conducted with library researches. Its findings disclose that foreign interventions by using firehose falsehood propaganda method by widely and intensively spreading hoax in society also vulnerably occurred in Indonesia's election. Its implications could be serious, not only for the future of the country's democracy, but also for its political stability and national security as well as its post-election state unity. The author recommends state apparatus and civil society, in addition to the National Election Committee (KPU) and the Election Observer Body (Bawaslu), to immediately respond such kind of propaganda practice, so that they can take preventive actions and address the practice through consistent measures.

Keywords: general elections, presidential elections, pilpres, democracy, foreign intervention, Indonesia.

Abstrak

Intervensi asing dan keterlibatan aktor non-negara, sejak masa persiapan pemilu dan kampanye berjalan, menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), termasuk di Indonesia, yang menyelenggarakan pemilu legislatif (pileg) dan presiden (pilpres) secara simultan pada 17 April 2019. Investigasi mengenai kasus ini di pengadilan AS semakin menyingkap tudingan intervensi Rusia melalui metode propaganda *firehose falsehood* dengan operasi intelijen terselubung (*covert intelligent operation*) yang sukses dijalankan. Praktik yang berbuah sukses pada kemenangan Trump telah menyadarkan masyarakat Indonesia atas kemungkinan dijalankannya praktik serupa di negara ini. Esai ini membahas tudingan intervensi Rusia yang mungkin terjadi dalam pemilu presiden (pilpres) di Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan menerapkan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Temuan mengungkap intervensi asing dengan menggunakan metode propaganda *firehose falsehood*, dengan pembuatan dan penyebaran *hoax* secara meluas dan intensif, juga terjadi dalam pemilu presiden di Indonesia. Implikasinya bisa serius, tidak hanya bagi prospek demokrasi, tetapi juga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta persatuan nasional pasca-pemilu. Tulisan ini merekomendasikan perlunya upaya aparat negara dan masyarakat sipil, tidak hanya KPU dan Bawaslu, untuk merespon praktik propaganda tersebut, sehingga dapat mencegah dan mengatasinya sejak dini secara konsisten.

Kata kunci: pemilihan umum, pemilu presiden, pilpres, demokrasi, intervensi asing, Indonesia.

PENDAHULUAN

Setelah Austria, Italia, Hongaria Venezuela dan Brazil, secara berturut-turut, Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 17 April 2019. Jauh lebih kompleks, pemilu di Indonesia tidak hanya dilakukan untuk memilih kepala pemerintahan/negara (pemilu presiden--pilpres), tetapi juga anggota parlemen (pemilu legislatif--pileg) secara

bersamaan. Karena waktu penyelenggaraannya yang simultan, pemilu di Indonesia juga lebih problematik, apalagi dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu di negara dengan tahap perkembangan demokrasi sudah jauh lebih maju.

Indonesia sendiri tahap perkembangan demokrasi belum mengalami proses konsolidasi demokratis, walaupun reformasi politik telah dimulai lebih dua dasawarsa lalu. Indeks demokrasi Indonesia

belakangan, walaupun terkoreksi, masih mengalami fluktuasi, sehingga membutuhkan koreksi hingga sistem politik Indonesia terkonsolidasi. Dalam skenario terburuk, negeri ini dideskripsikan berada di wilayah abu-abu, dengan prospek yang belum jelas, tetap dalam wilayah transisi demokratis, tanpa batas waktu kapan ia sudah dapat meninggalkan fase yang rawan itu.¹

Di tengah perbedaan momentum penyelenggaraan pemilu dan tahap perkembangan demokrasi yang ada antara di negara demokrasi maju dan Indonesia, terdapat persamaan tantangan dan masalah yang dihadapi. Secara realistis, pemilu yang baru diselenggarakan di Eropa, antara lain Austria dan Hongaria, maupun Amerika, seperti Amerika Serikat (AS) dan Brasil, serta Indonesia, telah membuka jalan bagi munculnya kepala pemerintahan yang mengusung gagasan populisme. Sebagai konsekuensinya, pemilu nasional juga menciptakan keterbelahan masyarakat (*political cleavage*),² dengan perbedaan dalam pandangan politik berkembang jauh lebih besar pasca-pemilu.³

Terlepas dari kondisi ini, penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi maju sudah jauh lebih baik, terbuka dan aman. Walaupun masih dijumpai kontroversi hasil pemilu, yang menyebabkan terbelahnya sikap masyarakat, namun solusi hukum atas sengketa pemilu yang belum tuntas dapat dilakukan, sehingga stabilitas politik nasional tetap terkendali. Dengan kata lain, di negara demokrasi maju, di tengah penyelenggaraan dan hasil pemilu yang masih belum memuaskan dan terbebas dari praktik kecurangan, secara menyeluruh mekanisme hukum masih dapat bekerja dengan baik, sehingga perilaku rezim yang terbentuk pasca-pemilu masih bisa dikontrol, termasuk oleh media massa dan masyarakat sipil, sebagai pilar-pilar penopang sistem demokrasinya.

Jika ditelisik lebih dalam, *fairness*, transparan dan independen dalam penyelenggaraan pemilu nasional merupakan persoalan penting. Kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip dan nilai-

nilai *fairness* dalam penyelenggaraan pemilu dan pengawasan yang lemah, termasuk absennya pihak internasional, telah memungkinkan berlangsungnya berbagai praktik intervensi asing. Dalam kasus terkini Amerika Serikat, dengan naiknya Trump ke panggung kekuasaan, intervensi asing ini dapat mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan dan membawa dampak lebih luas terhadap prospek rezim nasional yang terbentuk di negara yang baru saja menyelenggarakan pemilu nasional.⁴

Pelaksanaan pemilu dengan keterlibatan asing, baik aktor negara dan non-negara, membawa konsekuensi yang buruk bagi kinerja dan prospek rezim yang dihasilkan. Dampaknya dapat dilihat jauh lebih buruk di negara dengan tahapan demokrasi yang belum maju dan mapan (terkonsolidasi). Belajar dari pengalaman Amerika Latin, selain rezim bisa jatuh dan demokrasi kandas di jalan, bagi negara demokrasi yang masih rapuh kondisi demokrasinya, anarki yang datang, akan mengundang militer untuk masuk kembali untuk memulihkan keadaan.⁵ Indonesia pun telah mengalami ini di pertengahan dasawarsa 1960, melalui proses transisi politik yang kontroversial, yang dikaitkan dengan kudeta secara perlahan, karena tidak diikuti segera dengan pelaksanaan pemilu baru.⁶

Baik di negara yang perkembangan demokrasinya susah terkonsolidasikan seperti Amerika Serikat, maupun belum, seperti Venezuela dan Brazil, dan juga Indonesia, *political cleavage* bisa berkembang jauh lebih buruk, mengingat tingkat pluralisme masyarakat Indonesia yang jauh lebih kompleks, dan tingkat kecerdasan masyarakatnya yang terbatas dalam memahami masalah yang terjadi, terutama di bidang politik. Sebagai konsekuensinya, ketidakstabilan (instabilitas) politik menjadi ancaman besar, yang dapat membawa negara dengan tahap demokrasinya masih mengalami transisi dan berkembang tidak jelas di wilayah abu-abu menjadi sebuah *failed state*. Hal ini disebabkan oleh konflik politik berkepanjangan, yang terus memburuk, walaupun pemilu telah usai lama, akibat penyelenggaraan pemilu yang sejak awal telah diwarnai oleh absennya *fairness* dan adanya intervensi asing.

¹ Lihat, "Gerakan 'ganti presiden' tak dapat izin polisi, politis atau pelanggaran demokrasi?", *bbc.com*, 27 Agustus 2018, (*online*), (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45312977>, diakses 21 Agustus 2019).

² Alan S. Zuckerman "New Approaches to Political Cleavage: A Theoretical Introduction", *Comparative Political Studies*, Vol. 15, No. 2, July 1982, hlm. 131-144.

³ Tania Gosselin and Gábor Tóka, "The Impact of Cleavages on Political Participation and Electoral Volatility," *Paper prepared for the Canadian Political Science Association Annual Conference, 4-6 June 2008, Vancouver, British Columbia*; Lihat pula, Andreas Ufen, "The Evolution of Cleavages in the Indonesian Party System," *GIGA Working Papers*, No. 74 April 2008, hlm. 1-24.

⁴ Jennifer Szalai, "In 'The People vs. Democracy,' Trump Is Just One Populist Among Many," *The New York Times*, March 14, 2018; Niaz Murtaza, "Populism: Dangerous there, deadly here," *The Jakarta Post*, October 2, 2018, hlm. 6.

⁵ Juan J. Linz and Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Johns Hopkins University Press 1996.

⁶ Baskara T. Wardaya, *Membongkar Supersemar: dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno*, Jakarta: Galang Press, 2007.

Sebagaimana telah dijadwalkan, pada 17 April 2019, Indonesia menggelar pemilu presiden dan anggota DPR secara serentak, sebagai konsekuensi sistem politik demokrasi yang diadopsinya. Indonesia telah mendapat pujian dari masyarakat dan institusi internasional atas kemajuan politik yang telah dicapainya pasca-1998, dengan runtuhnya pemerintahan otoriter Soeharto, termasuk dalam kualitas pelaksanaan demokrasinya. Namun, perbaikan indeks kualitas demokrasinya yang mengalami peningkatan tipis, dari 72,11 di tahun 2017 ke 74,6 di tahun 2018,⁷ masih harus diuji dalam pelaksanaan pemilu presiden, dan juga pemilu legislatif, secara simultan tersebut.

Kajian ini membahas dan menganalisis kemungkinan intervensi asing, yakni Rusia, dalam pemilu nasional Amerika Serikat (AS) dan Indonesia, sebagaimana yang telah dituding para kontestan dan pendukungnya, serta media massa. Selanjutnya, ingin juga diketahui apa kepentingan Rusia untuk terlibat dalam pelaksanaan pilpres di AS dan Indonesia, serta apa implikasi pemilu yang tidak *fair* ini terhadap stabilitas pemerintahan dan prospek rezim di negara yang mengalaminya itu.

METODE PENELITIAN

Esai ini adalah hasil studi kepustakaan yang dilakukan selama beberapa bulan di perpustakaan parlemen (DPR). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian dan publikasinya dalam esai ini adalah agar dapat dilihat kelebihan dan kekurangan dari praktik penyelenggaraan pemilu presiden di negara lain dan juga Indonesia. Data dicari dari sumber referensi yang beragam, baik dari buku, jurnal, majalah, surat kabar ataupun sumber portal/daring. Data yang terkumpulkan dipilah dan dilihat relevansinya dengan permasalahan yang akan dijelaskan. Analisis dilakukan dengan melakukan proses penilaian atas sumber yang berbeda yang telah diperoleh itu, dengan melakukan *cross-check*-nya satu sumber data dengan yang lainnya. Data yang tidak relevan diabaikan, sedangkan data yang relevan dilihat hubungannya secara mendalam dan kritis.

⁷ *BeritaEmpatMata.com*, 18 Agustus 2018. Juga lihat untuk indeks kualitas demokrasi sebelumnya, tahun 2017, yang menunjukkan peningkatan dari 72,11 dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 70,09, dalam, "BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat, tapi Variabel Kebebasan Berpendapat Menurun", 15 Agustus 2018, (*online*), (<http://news.oke-zone.com/read/2018/08/15/337/1937125/bps-indeks-demokrasi-Indonesiamening-kat-tapi-variabel-kebebasan-berpendapat-menurun>), diakses pada 15 Mei 2019).

Sebelum analisis dilakukan, dipresentasikan dan didiskusikan konsep dasar mengenai pemilu dan intervensi asing untuk memberikan pemahaman dasar yang jelas dan dapat diterima, terutama mengenai praktik pemilu yang demokratis dan intervensi asing. Selanjutnya, esai membahas berbagai bentuk intervensi asing sebelum kemudian dilakukan analisis mengenai berbagai bentuk implikasinya. Di bagian akhir, selain kesimpulan, disampaikan beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan pemilu, terutama pilpres, yang lebih baik.

PEMBAHASAN

A. Pemilu Demokratis

Pemilu adalah salah satu parameter pelaksanaan sistem politik yang demokratis, yang dijalankan oleh sebuah negara. Realitas memperlihatkan .begitu beragamnya sistem pemilu yang hingga kini telah dilaksanakan negara-negara yang telah memilih untuk mengadopsi jalan politik demokratis dalam membentuk pemerintahan, menjalankan dan mengawasinya secara periodik secara konsisten dalam jangka panjang. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis itu sendiri mempunyai tolak ukur yang jelas dan dapat berlaku universal di negara manapun selama ia sampai sekarang telah menyatakan diri menerapkan sistem politik yang demokratis. Semua penilaian atas parameter bertitik-tolak dari penerapan prinsip *fairness*, yang maknanya secara luas, pemilu harus dijalankan secara bebas, terbuka dan transparan bagi semua pihak dan secara jujur untuk semua pihak yang berkontes sebagai peserta pemilu, apakah itu organisasi partai politik maupun individu. Selanjutnya, selain dilaksanakan secara terbuka, pelaksanaan pemilu tersebut harus terbebas dari segala bentuk upaya campur tangan atau intervensi pihak luar negeri (asing). Sedangkan tujuan pemilu yang demokratis itu adalah untuk memperoleh kursi parlemen di lembaga legislatif sebagai wakil rakyat (anggota parlemen) atau kursi kepresidenan sebagai presiden dan/atau perdana menteri, yang masing-masing sebagai kepala negara dan/atau pemerintahan, yang sah atau diakui legitimasinya.

Dipengaruhi oleh sejarah (perkembangan) politik yang dialaminya, setiap negara mempunyai pilihan (subyektif) masing-masing atas sistem pemilu yang dipilihnya, sesuai dengan karakteristik dan model demokrasi yang diadopsinya. Berlainan dengan yang sebelumnya, penyelenggaraan sistem pemilu Indonesia yang terkini menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden secara serempak, dalam waktu bersamaan, dalam proses, dengan mekanisme politik yang bersifat langsung.

Keputusan ini diambil pemerintah dan telah disetujui parlemen (DPR –Dewan Perwakilan Rakyat) melalui UU No.7/2017, setelah dalam beberapa pemilu sebelumnya, pileg diadakan lebih dulu dari pilpres secara langsung. Malahan, di masa pra-1998, selama beberapa dasawarsa pasca-kemerdekaan, presiden Indonesia dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan dengan pelaksanaan pilpres melalui pemilu langsung secara bebas dan terbuka ini diputuskan untuk efisiensi pembiayaan dan penyelenggaraannya agar hemat anggaran dan waktu, sehingga lebih banyak anggaran, waktu dan tenaga dapat dikontribusikan bagi agenda dan kegiatan kenegaraan lainnya.

Seperti di Jerman, pemilu legislatif (pileg) di Indonesia sebagai kombinasi penerapan sistem proporsional terbuka dan daftar partai. Rezim pileg yang belakangan diterapkan di Indonesia ini sangat berlainan dengan pileg di negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat, yang mengadopsi sistem distrik. Lebih jelas lagi, pileg di Indonesia mengadopsi metode *sainte laque* murni, dengan menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, yang tidak membedakan apakah itu partai kecil atau partai besar⁸.

B. Intervensi Asing

Intervensi asing bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang bersifat tradisional sampai modern, yang terkini dengan bantuan dan mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi. Di masa kolonialisme, intervensi asing didahului aksi pendudukan, di era dewasa ini teknologi memungkinkannya bersifat langsung tanpa perlu aksi penguasaan wilayah lebih dulu. Karenanya, sesuai dengan perkembangan jamannya, peran kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, menjadi dominan. Intervensi semacam ini ditandai dengan pembobolan akses masuk ke sumber data nasional sebuah negara, untuk kemudian dikacaukan dan diintervensi, dengan memasukkan data hasil rekayasa, berisi propaganda negara yang berkepentingan.

Pelaku intervensi asing dalam pelaksanaan pemilu nasional di berbagai negara bisa melibatkan *state actors* (aktor negara) dan *non-state actors* (aktor non-negara). Pelakunya bisa melibatkan satu atau lebih aktor yang dominan. Adapun aktor negara memperlihatkan kehadiran pemerintah negara asing secara langsung maupun tidak langsung,

yang dapat terdeteksi dari berbagai kebijakan yang diimplementasikan, terutama bantuan yang diberikan, secara resmi ataupun tidak resmi. Sementara, aktor non-negara yang terlibat berupa berbagai institusi non-pemerintah yang memang benar-benar bersifat mandiri maupun yang masih merupakan bagian dan kepanjangan tangan dari pemerintah. Globalisasi yang cepat dan keterbukaan yang meluas telah membuat peran aktor non-negara semakin besar dan signifikan dewasa ini di banyak tempat dan negara, serta berbagai sektor.

Selanjutnya, sebagaimana dalam kerja tradisional, dalam era kemajuan teknologi global dewasa ini, intervensi asing praktiknya semakin tidak tampak, tetapi implikasinya terasa dan dapat dilihat secara luas, karena hampir seluruhnya dijalankan menggunakan jalur siber. Secara realitis, operasi intelijen di dunia nyata lewat peran agen intelijen dan asetnya secara langsung di negara sasaran, sulit ditemukan dan dilacak, apalagi direspon dengan aksi kontra-intelijen secara langsung dan cepat. Dalam intervensi asing seperti ini, peran agen intelijen di lapangan diupayakan sangat minim. Sedangkan aset yang digunakan adalah lingkaran dalam yang berkepentingan langsung terhadap suksesnya target intervensi bagi calon presiden (capres) yang sudah dipersiapkan negara yang berkepentingan.

Melalui pesan propaganda yang disampaikan dan telah dipersiapkan sebelumnya secara seksama dan detil, upaya mempengaruhi masyarakat di negara tujuan dapat dilakukan jauh lebih halus, tanpa terlihat dan dirasakan mencolok. Harapan baru dibangun dari realitas palsu yang baru diciptakan, yang kemudian tercipta dan dapat diterima masyarakat begitu saja di negara tujuan intervensi dan ditelan bulat-bulat, tanpa filter dan direspon daya kritis masyarakat yang telah lama mati akibat telah terpapar disinformasi berskala besar dalam waktu lama, seiring dengan absennya aksi kontra-intelijen oleh pemerintah yang tengah diserang dan terancam.

Keterlibatan dan intervensi asing yang diwaspadai rawan dilakukan dewasa ini melalui propaganda *firehouse falsehood* dinilai sebagai salah satu ciri dari era *post-truth*, yang ditandai dengan mudahnya masyarakat begitu saja mempercayai informasi instan yang mereka terima tanpa menyelidiki atau mengujinya lebih lanjut. Lebih jauh lagi, era ini dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat, yang tidak mendasarkan lagi setiap informasi yang mereka terima berdasarkan obyektivitas dan realibilitas, serta logika. Sikap dan respons masyarakat dalam menerima informasi dari luar menjadi cenderung mencari dan membuat pembenaran (*justification*) daripada mencari

⁸ Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu, (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>), diakses 15 Mei 2019.

kebenaran (*truth*) yang sesungguhnya.⁹ Ketimpangan informasi antara yang benar dengan yang palsu (direkayasa) di negara yang akan dan tengah menyelenggarakan pemilu membuat terciptanya negara yang dipenuhi informasi asimetris. Akibat penggunaan disinformasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang, informasi yang benar dan berkualitas dengan mudah kemudian digeser disinformasi yang telah dibangun dan direkayasa,¹⁰ dalam hal ini untuk kepentingan propaganda negara yang melakukan intervensi. Kondisi informasi asimetris ini jelas memberi keuntungan bagi negara atau aktor non-negara yang jauh-jauh hari berkepentingan untuk melakukan intervensi atas penyelenggaraan pemilu di negara lain. Tetapi, sebaliknya, memberi implikasi yang buruk bagi negara dan pihak-pihak yang dirugikan, karena kalah dalam pemilu yang sudah diintervensi tersebut.

Pemilu yang tidak *fair* tidak boleh dihasilkan dari intervensi asing, sebab intervensi asing membuat penyelenggaraan pemilu di sebuah negara bisa menjadi tidak *fair* hasilnya bagi pihak yang berkontes dan masyarakat luas pendukungnya. Sehingga, ia dapat berimplikasi luas, terutama terhadap hubungan antar-negara yang bersangkutan dan negara yang dituding telah melakukan langkah intervensi itu. Di Indonesia, menjelang pemilu, kondisi informasi asimetris membesar akibat maraknya penggunaan *hoax*, penyebaran berita palsu (*fake news*) dan kampanye hitam melalui sebanyak 800.000 situs informasi,¹¹ yang digunakan dan dilancarkan pula oleh kontestan pileg dan pilpres tertentu.¹²

C. Bentuk Intervensi Asing

Keterlibatan asing secara legal, yang sesungguhnya lebih menggambarkan bantuan di tengah keterbatasan negara yang akan dan tengah menyelenggarakan pemilu, seperti Indonesia dan Timor-Leste, mengingat posisinya sebagai *new emerging democracies*, dapat disaksikan dalam bentuk berbagai kerja rutin, seperti pelatihan penyelenggaraan pemilu yang bebas, bersih, terbuka, dan juga efisien. Kerja sama ini dilakukan

dalam rangka sosialisasi dan diseminasi demokrasi sebagai sistem politik yang disadari relatif jauh lebih baik untuk dipilih oleh negara-negara di dunia ini, khususnya negara demokrasi baru. Karena itulah, kemudian diselenggarakan berbagai program *workshops*, termasuk yang ditujukan bagi para saksi dari partai-partai politik. Juga ada program pendidikan politik dan pelatihan bagi para calon anggota legislatif (caleg), yang pasca-pemilu biasanya dilanjutkan dengan program sosialisasi bagi anggota parlemen yang telah terpilih.

Kehadiran, sebagai keterlibatan secara konstruktif, bahkan dilakukan atas undangan pihak di negara yang sedang mempersiapkan pemilu, termasuk Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu 17 April 2019, terkait usulan menghadirkan pemantau asing. Djoko Santoso, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandy, mengungkapkan kehadiran para pemantau dari luar negeri cukup penting demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas, karena mereka bisa memberikan penilaian yang obyektif. Sedangkan Titi Anggraini, Direktur Perludem, LSM lokal, menilai legitimasi pemilu 2019 tidak tergantung pada ada atau tidaknya pemantau pemilu internasional, tetapi upaya memberi akses pada semua pemangku kepentingan untuk bisa mengambil peran mengawasi proses pemilu.¹³ Sementara itu, sejak 1999, pemilu Indonesia telah dihadiri pemantau asing, dan sejak 2004 KPU mengundang mereka secara resmi untuk memperkuat legitimasi pemilu.

Adapun institusi asing, termasuk *Non-Government Organizations* atau LSM yang sering hadir dalam membantu persiapan pemilu dan membantu pelatihan para caleg serta sebagai pemantau pelaksanaan pemilu di berbagai negara adalah IDEA dari Swedia dan LSM yang dipimpin mantan Presiden AS, Jimmy Carter. Mereka merupakan pengamat independen, yang kehadirannya tidak melakukan intervensi selama proses persiapan dan penyelenggaraan pemilu. Agar lebih mudah dan memberi manfaat lebih luas, mereka seringkali melakukan kerja sama dengan LSM domestik, kampus-kampus, lembaga pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri, KPU serta Bawaslu.

Adapun yayasan yang dipimpin Carter hampir tidak pernah absen memantau penyelenggaraan pemilu di berbagai negara. Yayasan politiknya bertujuan semata bagi terselenggaranya pemilu

⁹ Christopher Paul and Miriam Matthews, "The Russian 'Firehose of False-Hood' Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It," *Perspective*, Rand Corporation, 2016.

¹⁰ George A. Akerloft, "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism." *Quarterly Journal of Economics*, 84, 1970, hlm. 353-374.

¹¹ Aulia Bintang Pratama, "Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia," CNN Indonesia, 29/12/2016, (*online*), (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia>, diakses pada 15 Mei 2019).

¹² Kovalik, 2018, *op.cit.*

¹³ *Koran Sindo*, 25 Maret 2019: 2. Juga, Rakhmatulloh, "Bawaslu Pastikan 51 Lembaga Terakreditasi Ikut Pantau Pemilu," 26 Maret 2019, (*online*), (<https://nasional.sindonews.com/read/13-90250/12/bawaslu-pastikan-51-lembaga-terakreditasi-ikut-pantau-pemilu-1553599555>, diakses pada 15 Mei 2019).

yang bebas atau *fair* di dunia, sejalan dengan idealisme Carter yang amat menaruh perhatian terhadap perkembangan demokrasi global. Sebagai konsekuensinya, tidaklah mengherankan, AS, sebagai negara adidaya dunia, sering menjadi sorotan mengenai kemungkinan keterlibatannya melakukan intervensi dalam pemilu di berbagai negara, sesuai dengan kepentingan nasional yang dimilikinya.¹⁴

Bagaimana dalam praktiknya intervensi asing dalam pemilu ini dilakukan? Seiring dengan masuk ke dalam sistem komputer negara dan partai politik yang menjadi sasarannya, serta data pribadi yang dimiliki media sosial, pihak asing (negara luar) terlibat dalam ikut merencanakan dan mengembangkan kampanye negatif dan kotor (*smear and black campaigns*) terhadap lawan dari pihak yang didukungnya, dan sebaliknya, mendukung calon penguasa boneka yang akan dikuasainya, dengan merekayasa dan melebih-lebihkan kemampuan, kinerja dan prestasinya. Dengan cara ini, sebagai manfaat timbal-baliknya, kebijakan di masa depan si calon pemimpin yang didukung negara asing itupun diharapkan dapat diarahkan atau didikte pemerintah negara sponsornya.

Dalam implementasinya, selama kampanye, metode propaganda negatif, yang penuh kebohongan dan kepalsuan, yang diarahkan kepada pihak lawan, dilancarkan secara gencar dan kontiniu. Akibatnya, kalangan terpelajar atau terdidik pun, terkecoh dan terpedaya untuk diarahkan memilih kandidat pemimpin dukungan negara asing ini. Taktik propaganda ala Joseph Goebbles di era Hitler, telah diuji sukses dalam pemilu Jerman di tahun 1933, sukses dalam mengelabui rakyat Jerman yang cerdas dan dikenal logis berpikir dan dalam mengambil keputusan. Alhasil, Hitler, yang semula partainya dinilai *underdog*, Nazi, bisa memenangkan pemilu secara telak, dan ia pun terpilih sebagai Kanselir. Dalam perspektif Goebbles, kebohongan yang terus-menerus disampaikan, tanpa koreksi dan upaya *counter* dari lawannya, pada akhirnya dapat menimbulkan rasa percaya dan meyakinkan orang atas pesan yang disampaikan orang yang bekepentingan dengan berita bohong itu.

Oleh negara luar yang berkepentingan untuk mengontrol hasil pemilu negara lain dan penguasa barunya yang muncul, dan kelemahan *cyber security* teknologi informasi negara penyelenggara pemilu dimanfaatkan secara optimal, agar mereka bisa mengaplikasikan apa yang disebut, dan kini menjadi populer, *firehose of falsehood*.¹⁵ Dengan metode

terbaru, yang lebih canggih dari yang dipraktikkan Hitler lewat propaganda Goebbles, cara ini dipakai kembali dan dikembangkan Rusia lewat *covert intelligence operation*, dengan membantu kontestan pemilu presiden yang didukungnya di AS, Donald Trump. Sekutu, yang semula mitra bisnis Rusia itu, semula dianggap sebagai calon yang tidak cerdas dan pecundang. Sedangkan pesaing beratnya, Hillary Clinton, sebelumnya telah diunggulkan survei dan sangat percaya akan memenangkan pemilu.

D. Intervensi Rusia dalam Pemilu AS

Trump, calon presiden AS yang sejak awal tidak dijagokan, dan dinilai mudah dikalahkan oleh Hillary, pesaingnya, yang telah lama berpengalaman di politik dan pemerintahan, serta dunia internasional, selain cerdas, sebagai alumnus Universitas Yale. Metode propaganda Rusia yang dijalankan dengan mengampunikan kebohongan yang berkelanjutan dan berulang-ulang, dalam volume tinggi, dilancarkan secara cepat, meluas dan agresif lewat berbagai saluran komunikasi, untuk menyudutkan Hillary, dan sebaliknya, memoles citra Trump, sebagai kandidat yang lebih pantas untuk didukung dan dimenangkan pemilih AS. Dengan *firehose of falsehood* ini, informasi yang benar dijungkirbalikkan dan realitas obyektif dikesampingkan, demi mempengaruhi pemilih rasional, khususnya *swing voters*, di negara sasaran, agar calon yang didukung negara luar ini bisa memenangkan pemilu nasionalnya.¹⁶

Bentuk intervensi asing, yang semakin jelas tampak ilegal, walaupun masih dibantah Presiden AS, Donald Trump, terkait tuduhan atas kemenangannya yang dibantu Rusia, semakin terkuak dalam kasus pemilu AS ini.¹⁷ Investigasi yang masih berlangsung kian mengungkap peran asing, yakni Rusia, sejak kampanye pemilu AS berlangsung di November 2016. Pihak Trump berusaha terus membantah di berbagai gelar sidang pengadilan AS, yang ditakuti para pelanggar hukum di sana, karena otoritas dan kewibawaannya.

Laporan investigasi *New York Times*, pada 10 November 2016 berhasil menguak pengakuan seorang pejabat Rusia yang mengakui adanya kontak dengan Trump, yang kemudian menurut *Reuter*, pada 18 Mei 2017, Trump terungkap telah melakukan paling sedikit 18 kontak terselubung dengan pihak Rusia. Kemudian, *The Washington Post*, setahun pasca-penyangkalan itu, berhasil mengungkap para anggota tim kampanye kubu Trump telah melakukan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Malcom Nance, *The Plot to Hack America: How Putin's Cyberspies and WikiLeaks Tried to Steal the 2016 Election*. New York: Skyhorse, 2016.

¹⁴ Lihat, Don Kovalik, *The Plot to Control the World: How the US Spent Billions to Change the Outcome of Elections Around the World*. New York: Skyhorse, 2018.

¹⁵ Lihat kembali, Paul and Matthews, 2016, *loc.cit.*

interaksi dengan orang-orang di Rusia sebanyak 32 kali. Bahkan, lebih dari dua tahun kemudian dari laporan pertamanya tersebut, *New York Times*, dari hasil investigasinya lebih lanjut melaporkan, Trump dan tim pemenangannya telah melakukan kontak lebih dari 100 kali dengan pihak-pihak di Rusia sampai sebelum pelantikannya.¹⁸

Kasus keterlibatan negara lain dalam pemilu suatu negara tidak dilakukan secara transparan, karena jika ini terjadi, akan mudah diinvestigasi dan terungkap melalui pengadilan, sehingga kasusnya terbongkar, dan hasil pemilu pun bisa dibatalkan, dan presiden terpilih bisa dijatuhkan. Dengan demikian, wajar saja, aktivitasnya dilakukan melalui operasi intelijen terselubung, sehingga harus dibongkar pula lewat operasi kontra-intelijen oleh AS.¹⁹ Pada 6 Januari 2017, operasi ini berhasil mengungkap bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan upaya mempengaruhi kampanye pilpres AS. *Hearing* di Kongres AS di bulan Oktober 2017 berhasil mengungkap upaya agen-agen Rusia membeli iklan di *Facebook* dan mempengaruhi 126 juta pengguna media sosial itu.²⁰

Dengar pendapat di Kongres AS lebih jauh lagi mengungkap bahwa pihak Rusia telah mempublikasikan lebih dari 131.000 pesan di Twitter dan memasukkan lebih dari 1.000 video di media sosial YouTube.²¹ Tudingan terhadap 12 orang Rusia pada 13 Juli 2018 menyatakan bahwa intelijen Rusia telah berkonspirasi untuk memperoleh akses tidak resmi, membajak komputer pribadi dan institusi yang terlibat pilpres 2016 di AS. Lebih jelas lagi terungkap dalam investigasi melalui *hearing* di Kongres AS bahwa intelijen Rusia telah berkonspirasi untuk melakukan pencurian dokumen dari komputer yang telah dibajak itu untuk bisa mengintervensi pilpres AS.²²

Proses investigasi dan upaya saling menekan masih berlangsung di antara pihak yang berkonflik. Pimpinan Partai Demokrat di Kongres AS menolak kesimpulan Jaksa Agung Barr atas temuan Robert Mueller yang mengatakan tidak ada korelasi dan kolusi antara Trump dan Rusia yang mempengaruhi

hasil pemilu AS.²³ Kesimpulan ini ditolak pimpinan Partai Demokrat, yang menilai Jaksa Agung sebagai orang pemerintah yang tidak netral. Sehingga, walaupun tidak terbukti, namun bukan berarti Trump bebas dari segala tuduhan.²⁴

Bantahan pun datang dari pihak Rusia, secara langsung maupun tidak. Namun, proses pengadilan AS yang selama ini terbuka dan *fair*, serta memiliki otoritas dan kewibawaan sebagai salah satu pilar pengawal demokrasi AS bersama dengan lembaga legislatif dan media massanya, membuka mata rakyat AS dan masyarakat internasional mengenai praktik intervensi asing lewat pemilu. Bentuk intervensi di era milenium baru ini sesungguhnya merupakan penjelmaan dari perang asimetris dan *proxy war*, yang jauh lebih efisien dan sederhana, namun bisa memberi hasil optimal bagi negara yang berkepentingan. Tidak heran, ia dinilai sebagai salah satu bentuk ancaman non-tradisional pasca-Perang Dingin yang dilakukan dengan penggunaan *soft power* dan bukan *hard power*, dalam bentuk gelar operasi militer secara terbuka.

Trump dan para pendukungnya tidak atau lambat menyadari bahwa intervensi Rusia dalam pemilu 2016 AS yang berhasil memecah belah pendukung Partai Demokrat dan Hillary Clinton dan memenangkan Trump sebagai presiden adalah kelanjutan dari Perang Dingin yang belum selesai. Sehingga, terlalu dini untuk mengatakan bahwa dewasa ini AS adalah adidaya tunggal pemenang Perang Dingin. Sebab, "perang"-nya sesungguhnya, dalam wujud 'Perang Dingin' baru, dengan mentalitas dan target perang lama, sesungguhnya masih berlanjut. Sebaliknya, perkembangan dan realitas memperlihatkan situasi yang terbalik, dengan Rusia sebagai pemenangnya. Karena, seteru dan rival utama AS di masa Perang Dingin tersebut kini tampak dapat 'mendikte' dan 'menaklukkan' AS dengan menggiring dan mengarahkan pemimpinnya, Presiden Trump, dalam mengambil keputusan dan kebijakan, yang secara langsung maupun tidak langsung, mendukung kepentingan Rusia.

Dengan kata lain, Rusia, sebagai representasi Uni Soviet, tampaknya telah memenangi perang asimetris dan *proxy war* di era 'Perang Dingin' baru ini tanpa harus bersusah payah menciptakan ancaman penggunaan senjata-strategis dan menggunakan senjata, antara lain, rudal balistik berkepal nuklir. Jadi, tidak berlebihan dikatakan, Rusia dapat memenangi peperangan ini tanpa harus memiliki keunggulan (supremasi) dalam kapasitas

¹⁸ Nicholas Kristof, "The Trump-Russia story: Cue the lights," *The New York Times International Edition*, February 19, 2019, hlm. 11.

¹⁹ Don Kovalik and David Talbot. *The Plot to Scapegoat Russia: How the CIA and the Deep State Have Conspired to Vilify Putin*, New York; Skyhorse, 2017. Juga, Gregg Jarret, *The Russia Hoax: The Illicit Scheme to Clear Hillary Clinton and Frame Donald Trump Hardcover*. New York: Broadside Books, 2018. Lihat kembali, Nance, 2016, *op.cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Robert S. Mueller III, *The Mueller Report: The Final Report of the Special Counsel into Donald Trump, Russia, and Collusion*. New York: Skyhorse, 2019.

²⁴ *Koran Jakarta*, 26 Maret 2019, hlm. 8.

dan kapabilitas militer, serta kualitas kehidupan demokrasi, yang selama ini sangat dibanggakan oleh musuhnya itu.²⁵

E. Intervensi Rusia Dalam Pemilu Indonesia

Bagaimana dengan pelaksanaan pilpres di Indonesia? Dalam kenyataannya, isu intervensi asing juga muncul. Pasangan Capres 02 Prabowo-Sandi adalah yang pertama dituding memakai pihak asing di timnya. Capres 01 Jokowi-Ma'ruf yang mengangkat isu ini secara terbuka dan formal dalam Debat Capres I, pada 17 Januari 2019, walaupun tampaknya tidak bermaksud untuk diungkap pada mulanya. Bunyi gugatan yang disampaikan Capres Jokowi kepada pasangan Prabowo-Sandi dalam debat Presiden pada 2019 pada 3 Februari 2019 di Jakarta, terkait dengan keterlibatan asing, yakni aktor non-negara dari Rusia, dalam tim kampanyenya:

"....Yang dipakai konsultan asing. Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, enggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak. Membuat rakyat takut, enggak peduli....

.....Seperti yang saya sampaikan, teori propaganda Rusia seperti itu. Semburkan dusta sebanyak-banyaknya, semburkan kebohongan sebanyak-banyaknya, semburkan hoaks sebanyak-banyaknya sehingga rakyat menjadi ragu. Memang teorinya seperti itu,

.....Konsultannya konsultan asing. Terus yang antek asing siapa? Jangan sampai kita disuguhi kebohongan yang terus-menerus. Rakyat kita sudah pintar, baik yang di kota atau di desa,"²⁶

Jadi, tampak sekali, Jokowi sejak semula tidak bermaksud mengangkat isu ini, namun karena pasangan Prabowo-Sandi sudah menyerangnya secara langsung, yang menudingnya seolah selama ini bergantung pada pihak asing melalui ketergantungannya dalam mencari investasi-investasi semaksimal mungkin. Jokowi pun kemudian berupaya mengangkat dan sekaligus memanfaatkan isu tersebut untuk merespon dan memojokkan rivalnya, pasangan Prabowo-Sandi, untuk menghentikan upaya memojokkannya dengan cara yang dibuat-buat dan didramatisasi lebih jauh. Dalam keterangannya di debat terbuka itu,

²⁵ Lihat, Michael Isikoff and David Corn. *Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump*. New York: Hachette Book Group, 2018.

²⁶ Ihsanuddin, "Jokowi: Prabowo-Sandi Pakai Konsultan Asing, Terus yang Antek Siapa?" (*online*), (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/03/1426-1241/jokowi-prabowo-sandi-pakai-konsultan-asing-terus-yang-antek-siapa>, diakses pada 21 Agustus 2019).

Jokowi juga memberi contoh kasus *hoax* mengenai tujuh kontainer surat suara tercoblos, selain *hoax* penganiayaan Ratna Sarumpaet, yang ketika itu masih bergabung dalam BPN Prabowo-Sandi. Sebelum ini, Jokowi sebetulnya sempat menyinggung soal kubu Capres 02 Prabowo-Sandi yang menggunakan konsultan asing dalam menghadapi Pilpres 2019.²⁷

Dalam merespon tudingan lawan debatnya, Jokowi pada akhirnya dalam debat presiden secara langsung dan terbuka, yang ditonton masyarakat Indonesia dan dunia itu, menyebut nama negara Rusia, walaupun maksudnya belum tentu melibatkan aktor negara, melainkan non-negara. Sebagai implikasinya, Pemerintah Rusia merasa menjadi pihak yang tertuding secara langsung terkait dukungannya pada Prabowo-Sandi. Kemudian, sehari pasca-Debat I, pendukung Jokowi-Ma'ruf mengungkap habis-habisan metode propaganda Rusia *firehose of falsehood* ini, yang penuh *hoax*, pemutarbalikan fakta dan dijalankan secara sistematis dan konsisten, dengan volume tinggi, secara luas dan intensif. Hal ini mereka lakukan sebagai langkah deterren dan juga mencegah suksesnya sejak dini dalam pilpres 17 April 2019.

Selanjutnya, kedatangan Jenderal Wesley Clark, mantan Panglima *North Atlantic Treaty Organization* dan KSAD AS, ke Hambalang, dalam simposium "*Strategic Issues of Asia-Pacific*," Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, kompleks perumahan pribadi Prabowo, rawan dikaitkan dengan tudingan pelibatan pihak asing oleh kubu lawannya, capres 01.²⁸ Kehadiran Jenderal Clark, yang juga mantan capres dari Partai Demokrat dalam pilpres AS tahun 2004, adalah atas undangan universitas itu, yang Prabowo pendiri yayasannya.²⁹ Posisi Jenderal Clark sebagai orang penting di AS, menarik perhatian publik, terutama dari kubu lawannya, pasangan 01, yang berusaha mencari kelemahan lawannya, walaupun Clark tidak diundang sendiri, tetapi juga

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat, "Jokowi Pidato Kebangsaan di n Konvensi Rakyat," *Media Indonesia*, 23 Februari 2019, (*online*), (<https://mediaindonesia.com/read/detail/218740-jokowi-pidato-kebangsaan-di-konvensi-rakyat>, diakses pada 15 Mei 2019). Lihat juga, Wahyu Kelik Nugroho, "Prabowo Diskusi Bersama Eks Jenderal AS di Hambalang," (*online*), (<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/prabowo-diskusi-bersama-eks-jenderal-as-di-hambalang/arBTVZTY?li=AAfupQr&ocid=iehp-&%3F=AAfuAgL%3FOCID>, 22 Februari 2019).

²⁹ Medistiara, Yulida. "Prabowo Ajak Mantan Panglima NATO AS Ceramah di Hambalang," (*online*), (<https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantanpanglima-nato-as-ceramah-di-ham-balang-Detik.news>, 22 dan 24 Februari 2019, diakses pada 26 Februari 2019).

ada Muhammad Azumi bin Muhammad, mantan Panglima AD Malaysia.

Terlepas dari adanya undangan di tengah menghangat isu *firehose of falsehood* dari Rusia, kehadiran mantan petinggi pemerintah AS itu, bagi kubu capres 02, bisa pula ditujukan untuk menetralkan situasi, terutama dari pihak yang mencurigai keterlibatan Rusia. Sedangkan buat AS, undangan Jenderal Clark bisa dimanfaatkan untuk memperlihatkan masih hadir dan dibutuhkannya peran AS di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, khususnya Indonesia, setelah negeri ini belakangan absen dari kawasan. Secara lebih luas, bisa pula dimaknakan bahwa AS tidak akan membiarkan Rusia merajalela dan dapat mengontrol Indonesia seorang diri, di kawasan, yang di masa Perang Dingin, telah berperan sebagai polisi global.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf juga tidak luput dari tuduhan melibatkan pihak asing dari kontestan pilpres pesaingnya, Prabowo-Sandi. Tetapi, kemudian, pendukung Jokowi-Ma'ruf di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklaim berhasil membongkar dan meng-*counter*-nya. Para pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam PSI mengungkapkan bahwa pendukung Prabowo-Sandi masih berusaha menghancurkan citra Presiden Jokowi dengan menciptakan dan membangun citra seolah-olah pasangan Capres Jokowi-Ma'ruf telah menghadirkan konsultan asing, yang memiliki hubungan dengan Israel, yakni Stanley Greenberg.³⁰

Isu keterlibatan Israel di Indonesia tentu tidak kalah gaungnya dibandingkan dengan isu keterlibatan Rusia, mengingat kebijakan nasional yang anti-komunisme yang dianut Indonesia lebih dari 5 dasawarsa, sejak naiknya Soeharto, Presiden Indonesia dengan latar belakang militer. Isu kehadiran konsultan Yahudi sejak 2013 ini diangkat oleh orang dekat tim Prabowo-Sandi untuk kembali menyudutkan Jokowi secara lebih kuat pasca-Debat I, karena sebagaimana dijelaskan Jubir PSI, Daniel Tumiwa, isu ini bukan *hoax* murahan. Isu keterlibatan Greenberg dinilai sebagai upaya jahat yang sudah direncanakan 2 tahun sebelum agenda pilpres dimulai, sehingga para pendukung Jokowi-Ma'ruf berusaha langsung menyetopnya.³¹

Isu keterlibatan asing tidak hanya menyebut soal metode propaganda Rusia dan keterlibatan konsultan AS dan Yahudi, tetapi juga dikaitkan dengan adanya nama WNA yang masuk dalam DPT

(Daftar Pemilih Tetap). Belakangan masalah ini sudah di-*clear*-kan KPU, yang hasil investigasinya mengungkap kesalahan administrasi kependudukan dan catatan sipil di beberapa wilayah, yang tumpang-tindih dalam pembuatan KTP-El mereka. KPU pun telah mengatasinya dengan mencoret 370 nama WNA dari DPT.³² Selanjutnya, KPU telah mengungkap dan mengakui adanya berbagai upaya *hackers* dari berbagai negara, dan kemudian menyebut juga nama negara Rusia, selain China, yang berusaha membobol sistem IT komputernya. Sedangkan soal surat suara yang sudah dicoblos asal China tersebut, yang telah didesiminasikan secara viral oleh pendukung pasangan Prabowo-Sandi, ditemukan KPU sebagai murni *hoax*.³³

F. Implikasi Intervensi Asing Atas Pemilu As dan Indonesia

Sementara itu, investigasi Kongres AS telah menyebabkan mundurnya beberapa orang dekat Trump. Pasca-Menteri Pertahanan, Jim Mattis yang pada 20 Desember 2018 mengumumkan pengunduran dirinya, Kepala Keamanan Nasional, Michael Flynn, pun segera melakukan hal yang sama. Adapun Flynn, sedikit berbeda, ia terpaksa harus mundur karena telah terbukti membohongi FBI selama investigasi intervensi Rusia dalam pemilu 2016 di AS yang kian terbongkar dan mengancam prospek pemerintahan Trump ini. Michael Cohen, pengacara pribadi Trump, belakangan, dalam testimoninya di depan *Oversight Committee* Kongres AS pada 27 Februari 2019, mengakui kebohongan-kebohongan Trump. Jadi, keterlibatan Rusia atas kemenangan Trump dalam pemilu AS, walau telah dibantah oleh para pemimpin Rusia, termasuk Putin, telah membawa implikasi serius bagi negara dan rakyat AS. Energi Trump dan bangsa Amerika lebih terkuras untuk mengurus investigasi politik dan hukum dari kasus ini ketimbang memenuhi janji kampanye, *America First!* Sebaliknya, Trump semakin otoriter, sehingga kebijakannya semakin membahayakan kepentingan nasional Amerika.

Pasca-tuduhan adanya keterlibatan Rusia membantu tim pendukung (BPN) pasangan Capres 02 Prabowo-Sandi, itu, kegaduhan pun muncul. Implikasi ini tidak hanya tampak di kalangan politisi nasional, tetapi juga perwakilan asing di Indonesia, khususnya Kedubes Rusia, yang menjadi tertuduh utama. Dubes Rusia di Jakarta, yang belum lama menduduki posnya, Lyudmila Georgievna Vorobieka, pun segera harus menyampaikan bantahan. Ia menegaskan bahwa Rusia tidak pernah ikut campur

³⁰ Lisye Rahayu, "Jokowi Dikaitkan Konsultan Stanley Greenberg, Fadli: Itu yang Saya Dengar," *detikNews*, Rabu 06 Februari 2019.

³¹ Yustinus Paat. "PSI Bongkar "Rencana Jahat" Hancurkan Jokowi dengan Greenberg," *Beritasatu.com*, 15 Februari 2019.

³² *Republika*, 14 Maret 2019, hlm. 3.

³³ *Rakyat Merdeka*, 12 Maret 2019, hlm. 3.

urusan dalam negeri atau domestik negara lain, sambil merujuk pada kasus di AS yang dikatakannya tidak berdasar dan tanpa bukti.³⁴

Pendukung Trump di dalam negeri AS pun mengeluarkan bantahan, dan mengatakan semua tudingan itu tidak ubahnya *hoax*.³⁵ walaupun proses pengadilan yang terus berjalan kian mengungkap realitas sebaliknya, sehingga Trump pun lambat-laun tidak terlepas dari ancaman *impeachment*. Terpisah dari itu, dengan munculnya bantahan Dubes Rusia di Jakarta, pihak Jokowi kemudian telah mengoreksi tudingannya, dengan mengatakan bahwa yang telah melancarkan intervensi bukanlah aktor negara secara formal, melainkan aktor-aktor non-negaranya, yang dapat terlibat sebagai konsultan.³⁶

Merespon tudingan paslon atau Capres 01 itu, kubu Capres 02 melancarkan serangan balik, dengan mendaur ulang isu keterlibatan Stanley Greenberg, ahli strategi pemenangan pemilu, yang pernah disampaikan sebelumnya, tetapi tidak mendapat tanggapan luas. Persoalan seriusnya bukan karena Greenberg berpengalaman dalam memenangkan PM Tony Blair dan Presiden Clinton, namun karena isi tudingan memang informasi yang sudah direkayasa, dengan mengaitkan Greenberg dengan para tokoh dan jejaring Yahudi di Israel.³⁷ Tentu saja tudingan yang bersumber dari *hoax* ini menjadi persoalan serius buat kubu Capres 01 pasangan Jokowi-Ma'ruf, mengingat kebijakan dan politik pemerintah dan sikap masyarakat Indonesia yang anti-Israel.

Seperti sebelumnya, *hoax* daur ulang ini juga tidak bergaung luas, dan segera berlalu setelah kubu pasangan Jokowi-Ma'ruf menjelaskan bahwa tidak pernah ada keterlibatan Greenberg dan lembaga konsultannya. Untung saja, implikasi isu adanya intervensi asing (negara luar) dan saling-tuding tentang melibatkan pihak asing ini belum berakibat luas seperti di AS, karena memang pemilu simultan di Indonesia belum dimulai pada waktu itu. Tetapi, jika terus berlangsung dan mengacau hasil pemilu Indonesia, implikasinya bukan tidak mungkin jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang telah berlangsung di AS, mengingat keterbelahan politik masyarakat akan semakin dalam, di tengah kinerja atau kapasitas aparat penegak hukum yang buruk di Indonesia. Kondisi akan kian kompleks, jika pihak asing yang terlibat bertambah, sebab perang intelijen asing menjelang dan pasca-pemilu 17 April 2019 dapat berimplikasi lebih luas bagi prospek politik dan stabilitas keamanan Indonesia, dan juga kawasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbeda dengan pemilu pertama di tahun 1955, pemilu Indonesia, yakni pilpres, di era reformasi tidak luput dari isu intervensi asing, yakni Rusia. Tudingan adanya keterlibatan Rusia dalam pemilu Indonesia perlu diinvestigasi lebih lanjut, untuk memperbaiki kualitas pemilu di masa depan, serta mencegah berbagai implikasi negatifnya yang dapat terjadi kemudian dan berpengaruh negatif terhadap jalannya pemerintahan. Perkembangan isu adanya intervensi Rusia dalam pemilu nasional Indonesia perlu terus dicermati, agar tidak muncul konflik yang berdampak pada delegitimasi hasil pemilu, seperti yang tengah diperdebatkan di AS, sehingga dapat memicu konflik politik yang kemudian mengganggu jalannya pemerintahan akibat ketidakpercayaan dan ketidakpuasan atas hasil pemilu.

Situasi dunia dewasa ini yang begitu terbuka dan maju perkembangan teknologi informasinya secara khusus perlu diwaspadai implikasinya. Ini tampak lebih-lebih lagi dalam hubungannya dengan intervensi asing dalam pemilu di Indonesia, dengan menggunakan propaganda *firehose of falsehood*. Kemungkinan terjadinya intervensi asing dengan praktik ini semakin besar, mengingat posisi Indonesia sebagai negara besar dan penting di kawasan, dengan banyak pihak asing yang harus disadari berkepentingan untuk bisa mempengaruhi, apalagi mengontrol hasil pemilu. Caranya adalah dengan membantu memenangkan calon yang berusaha didukungnya, secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dengan meretas data personal para pendukung dan pemilih.

Eksistensi intervensi asing tidak boleh dianggap enteng, mengingat akibatnya yang telah terjadi dan dapat dilihat di berbagai negara, termasuk AS, dalam kasus kemenangan Trump, yang sangat kontroversial. Sebagai konsekuensinya, baik KPU dan Bawaslu, maupun kontestan pilpres dan masyarakat harus mewaspadai kemungkinan intervensi asing, sehingga pemilu Indonesia berlangsung secara *fair*. Praktik *firehose of falsehood* harus direspon dengan langkah investigasi KPU dan Bawaslu lebih lanjut. Untuk itu, para penyelenggara dan pengawas pemilu bersama aparat keamanan, harus turun ke lapangan, sampai ke tingkat akar rumput, untuk menangkal pembuatan dan penyebaran *hoax*, dengan memberikan sanksi hukum yang tegas. Praktik propaganda *ala Goebbles* maupun *firehouse of falsehood* harus dapat ditangkal aparat penyelenggara dan pengawas pemilu, dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi politik serta penerangan yang kontiniu dan konsisten, terutama ketika pelaksanaan pemilu semakin dekat. Langkah

³⁴ *Republika*, 14 Februari 2019, hlm. 7.

³⁵ Kovalik and Talbot, 2017, *op.cit.* Juga, Jarret, 2018, *op.cit.*

³⁶ *Media Indonesia*, 6 Februari 2019, hlm. 3.

³⁷ *The Jakarta Post*, February 7, 2019, hlm. 1.

penerangan dan *counter* dari segenap aparat yang berwenang dan bertanggung jawab secara serius dan tegas akan efektif menangkal segala macam bentuk propaganda dan *hoax* yang merugikan kontestan dan merusak hasil pemilu dan kualitas demokrasi. Jadi, setiap aksi propaganda memutarbalikkan fakta dan menyesatkan, serta kampanye hitam, harus segera dihentikan dan di-*counter* dengan data atau fakta yang benar, sehingga mereka yang berkepentingan, terutama pelaku non-negara dari mancanegara, tidak berhasil memutarbalikkan fakta dan mengacaukan hasil pemilu dan merusak kualitas demokrasi di Indonesia, yang tengah tumbuh ini.

B. Rekomendasi

Pasca-tudung keterlibatan Rusia, perlu diwaspadai bagaimana respon aparat pengawas pemilu terhadap kemungkinan intervensi yang tidak kelihatan, yang sudah bisa dilakukan sejak awal persiapan pilpres. Begitu pula, perlu dipersiapkan tindakan pencegahan dan penindakan apa yang dapat dilakukan KPU dan Bawaslu, serta masyarakat sipil ketika menemui atau menghadapi kasus adanya intervensi asing di lapangan. Sebagai konsekuensinya, tidak hanya Bawaslu yang harus pro-aktif di lapangan, tetapi juga para aparat dan intelijen nasional Indonesia, sehingga mereka harus bekerja secara cermat untuk bisa menangkalnya.

Bawaslu sendiri harus dipersiapkan dengan bekal pengetahuan ekstra di bidang inteljen yang tinggi. Mereka harus tahu lebih mendalam praktik-praktik rekayasa pilpres lewat teknologi informasi dan operasi intelijen canggih dalam jenis perang asimetris dan untuk tujuan *proxy war*. Secara fundamental, Bawaslu, dan juga KPU, sejak dini, sudah harus memahami apa yang dimaksud dengan *proxy war*, perang asimetris, praktik operasi intelijen era industri 4.0, dan upaya pengamanannya. Sedangkan, aparat keamanan, terutama intelijen, sudah harus memiliki kemampuan dan siap mengambil langkah setiap saat untuk mencegah dan menangkalnya dengan penyiapan atau perencanaan operasi kontra-intelejen yang jauh lebih baik dan canggih, yakni selangkah di depan. Tentu saja, bukan sebaliknya, dengan meneruskan cara kerja tradisional yang terbatas dan biasa-biasa saja, seperti selama ini.

Secara khusus, pihak Kementerian Luar Negeri tidak boleh lepas tangan mencermati kehadiran pihak asing, baik orang maupun institusinya, dalam melakukan kegiatan observasi pemilu di Indonesia. Keinginan berbagai pihak, baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah, di mancanegara untuk melihat jalannya pemilu demi mengawasi jalannya pemilu di tanah air, tidak perlu

ditolak ataupun dilarang. Dunia yang kian terkoneksi global dan terbuka membutuhkan kerja sama, termasuk terkait informasi pelaksanaan pemilu nasional di setiap negara. Sebaliknya, berbagai pihak di dalam negeri Indonesia dapat bersikap bijak dan cermat untuk memanfaatkannya bagi peningkatan kualitas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu, termasuk pilpres.

Upaya berbagai pihak di dalam negeri dalam mencermatinya termasuk penilaian atas laporan yang dibuat pihak asing ke pemerintah negara asal, dan penyandang dana kegiatan mereka. Kerja sama kolaboratif antar-institusi di tanah air menjadi dibutuhkan, termasuk dengan lembaga non-pemerintah di tingkat domestik, untuk memperoleh masukan yang konstruktif, yang dapat dikonstruksikan pada pemerintah dan pihak-pihak lain penyelenggara pemilu di Indonesia, demi perbaikan kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanson, Victor Davis. (2019). *The Case for Trump Hardcover*. New York: Basic Book.
- Jarret, Gregg. (2018). *The Russia Hoax: The Illicit Scheme to Clear Hillary Clinton and Frame Donald Trump Hardcover*. New York: Broadside Books.
- Kovalik, Don. (2018). *The Plot to Control the World: How the US Spent Billions to Change the Outcome of Elections Around the World*. New York: Skyhorse.
- Kovalik, Don and David Talbot. (2018). *The Plot to Scapegoat Russia: How the CIA and the Deep State Have Conspired to Vilify Putin*. New York: Skyhorse.
- Linz, Juan J. and Alfred Stepan. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Johns Hopkins University Press.
- Mueller III, Robert S. (2019) *The Mueller Report: The Final Report of the Special Counsel into Donald Trump, Russia, and Collusion*. New York: Skyhorse.

Wardaya. Baskara T. (2007). *Membongkar Supersemar: dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno*. Jakarta: Galang Press.

Jurnal

Akerloft, George A. (1970). The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *Quarterly Journal of Economics* 84, 353-374.

Aspinall, Edward. (2015). Inequality and democracy in Indonesia, *Kyoto Review of Southeast Asia*, Issue-17, March 2015, Center for Southeast Asia Studies, Kyoto University, <https://kyotoreview.org/issue-17/inequality-and-democracy-in-indonesia/>, diakses pada 14 Februari 2019.

Fossati, Diego and Eve Warburton. (2018). Indonesia's Political Parties and Minorities. *Perspective*, No. 37, Issue 2018, ISEAS, Yusof Ishak Institute, 1-14.

Paul, Christopher and Miriam Matthews (2016). The Russian 'Firehose of False Hood' Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It. *Perspective*, Rand Corporation

Ufen, Andreas. "The Evolution of Cleavages in the Indonesian Party System," *GIGA Working Papers*, N° 74 April 2008, hlm. 1-24.

Zuckerman, Alan S (1982). New Approaches to Political Cleavage: A Theoretical

Introduction. *Comparative Political Studies*, Vol. 15, No. 2, July 1982, 131-144.

Makalah

Gosselin, Tania and Gábor Tóka. (2008). "The Impact of Cleavages on Political Participation and Electoral Volatility," *Paper prepared for the Canadian Political Science Association Annual Conference*, 4-6 June 2008, Vancouver, British Columbia.

Surat kabar

Damayanti, Angel.(2019, Maret 5). 'Proxy War' di Pilpres 2019, *Kompas*.

Jaramaya, Rizky. (2019, Februari 14). Vorobieva: Rusia tak Campuri Urusan Domestik Indonesia, *Republika*.

Koran Jakarta, 26 Maret 2019, hlm. 8.

Koran Sindo, 25 Maret 2019, hlm 2.

Kristof, Nicholas. (2019, Februari 19). The Trump-Russia story: Cue the lights. *The New York Times International Edition*.

New York Times, 10 Nopember 2016.

Niaz Murtaza (2018, Oktober 2). Populism: Dangerous there, deadly here. *The Jakarta Post*.

OAS Ancam Intervensi Militer ke Venezuela. (2018, September 14). *Suara Pembaruan*.

Pelakunya dari Dalam dan Luar Negeri: Hacker Mulai Serang KPU. (2019, Maret 14). *Rakyat Merdeka*.

Rahayu, Lisye. (2019, Februari 6). Jokowi Dikaitkan Konsultan Stanley Greenberg, Fadli: Itu yang Saya Dengar. *DetikNews*.

Reuter, pada 18 Mei 2017.

Seiff, Raafi. (2019, Februari 19). Jokowi and Clinton 'phenomenon'. *The Jakarta Post*.

Szalai, Jennifer. (2018, Maret 14). In 'The People vs. Democracy,' Trump Is Just One Populist Among Many. *The New York Times*.

Portal

Antara. (2018). BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat, tapi Variabel Kebebasan Berpendapat Menurun. (online), (<http://news.okezone.com/read/2018/08/15/337/1937125/bps-indeks-demokrasi-indonesia-meningkat-tapi-variabel-kebebasan-berpendapat-menurun>), diakses 15 Mei 2019).

Aljazeera. (2018). From riches to rags: Venezuela's economic crisis. (online), (diakses 20 September 2018)

BBC. (2018). Gerakan 'ganti presiden' tak dapat izin polisi, politis atau pelanggaran demokrasi?. (online), (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45312977>), diakses pada 21 Agustus 2019).

BBC. (2018). How Venezuela's crisis developed and drove out millions of people. (online), (diakses 19 September 2018).

Berita Empat Mata.com, 18 Agustus 2018.

Ihsanuddin. (2019). Jokowi: Prabowo-Sandi Pakai Konsultan Asing, Terus yang Antek Siapa?. (online), (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/03/1426-1241/jokowi-prabowo-sandi-pakai-konsultan-asing-terus-yang-antek-siapa>), diakses pada 21 Agustus 2019)

Media Indonesia. (2019). Jokowi Pidato Kebangsaan di Konvensi Rakyat. (online), (<https://mediaindonesia.com/read/detail/218740-jokowi-pidato-kebangsaan-di-konvensi-rakyat>), diakses 15 Mei 2019)

- Medistiara, Yulida. (2019). Prabowo Ajak Mantan Panglima NATO AS Ceramah di Hambalang. (*online*), (<http://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-hambalang>, diakses 26 Februari 2019)
- Nugroho, Wahyu Kelik. (2019). Prabowo Diskusi Bersama Eks Jenderal AS di Hambalang. (*online*), (<http://www.msn.com/id-id/berita/nasional/prabo-wo-diskusi-bersama-eks-jenderal-as-di-hambalang/arBBTVZTY?li=AAfupQr&ocid=iehp-&%3F=AAfuAgL%3FOCID>, diakses 22 Februari 2019)
- Paat, Yustinus. (2019). PSI Bongkar “Rencana Jahat” Hancurkan Jokowi dengan Greenberg. (*online*), (Beritasatu.com, diakses 15 Februari 2019).
- Perdana, Agni Vidya. (2019). AS: Kami Tak Mengakui Rezim Maduro sebagai Pemerintah Sah Venezuela. (*online*), (Kompas.com diakses 15 Februari 2019).
- Pratama, Aulia Bintang. (2016). Ada 800 Ribu Situs Penyebar Hoax di Indonesia. (*online*), (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229-170130-185182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia>, diakses 15 Mei 2019)
- Rakhmatulloh. (2019). Bawaslu Pastikan 51 Lembaga Terakreditasi Ikut Pantau Pemilu. (*online*), (<https://nasional.sindonews.com/read/13-90250/12/bawaslu-pastikan-51-lembaga-terakreditasi-ikut-pantau-pemilu-1553599555>, diakses 15 Mei 2019)
- The Guardian. (2018). Venezuela elections: Maduro wins second term. (*online*), (<http://www.theguardian.com/world/2018/may/21/venezuela-elections-nicolas-maduro-win-second-term>, diakses 15 Mei 2019)

